

RANCANGAN

CATATAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM, KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KPK DAN
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RKA-KL 2019

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018.
Waktu : Pukul 10.33 – 11.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris MA dan KPK dibuka pukul 10.33 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Kahar Muzakir, dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Penyesuaian RKA-K/L 2019 hasil pembahasan Badan Anggaran
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pagu alokasi anggaran KPK 2019 awalnya adalah Rp. 813,45 miliar, setelah ditelaah kembali usulan penambahan anggaran itu menjadi Rp. 432,5 miliar.
 - Total usulan anggaran KPK sebesar Rp. 1.245,5 M
 - Usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan KPK, di antaranya:
 - ❖ Peningkatan target penindakan dari 100 Kasus menjadi 200 kasus sebesar Rp.50 M

- ❖ Kebutuhan layanan dasar perkantoran (listrik, telepon, air, lisensi IT, dll) sebesar Rp.20,69 M (Alokasi tersedia hanya cukup untuk 3 Bulan Layanan)
- ❖ Peningkatan Infrastruktur TIK sebesar Rp.28,7 M
- ❖ Pengadaan lahan 5000 M² sebesar Rp.250 M
- ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp.62,68 M
- ❖ Usulan anggaran Rp.20,69 M ini adalah kebutuhan layanan untuk perkantoran, ini yang tidak bisa di tawar lagi karena memang harus di bayar. Untuk listrik, telepon, air, dan yang lain-lainnya, termasuk itu disana. Kalau anggaran ini misalnya tidak diberikan/tidak dipenuhi berarti harus memikirkan untuk memotong anggaran di pos mana. Mungkin biaya perjalanan atau dari yang mana, karena ini memang sesuatu yang harus dibayarkan.
- ❖ Anggaran Rp.28,7 ini adalah untuk peningkatan infrastruktur. Jadi teknologi informasi di KPK.
- ❖ Anggaran Rp.250 M ini adalah untuk pengadaan lahan 5 ribu meter. Tanah ini ada bersebelahan atau ada di belakang KPK. Jadi rencananya kalau ini dipenuhi maka nanti kebutuhan untuk perkantoran akan diperluas dengan lahan 5 ribu meter ini. Termasuk parkir dan termasuk penambahan pegawai.
- ❖ KPK berharap agar semua usulan dipenuhi, walaupun tidak bisa, paling tidak usulan yang Rp.50 M dan Rp.20 M bisa dipenuhi termasuk yang Rp.62 M. Anggaran Rp.62 Miliar ini memang ada penambahan pegawai, dan ada juga yang naik *grade*, jadi otomatis itu memang sudah harus kita penuhi.
- ❖ Kalau memang usulan tidak bisa dipenuhi semua karena keterbatasan dana maka diharapkan soal gaji, operasional, dan termasuk kebutuhan kantor bisa di penuhi.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Wakapolri (Kapolri berhalangan hadir), diantaranya adalah sebagai berikut :

- Alokasi anggaran Polri T.A. 2019 sebesar Rp. 86,187 triliun berkurang sebesar Rp. 8,843 triliun atau 9,3% dari alokasi anggaran Polri T.A. 2018 sebesar Rp. 95,031 triliun, namun jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran Polri T.A. 2019 sebesar Rp. 76,213 triliun bertambah sebesar Rp. 9,974 triliun atau 13,1%.
- Tambahan pada penetapan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9,974 triliun, terdiri dari :
 - ❖ Sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 9,750 triliun, dari:
 1. Pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar Rp. 500 miliar, untuk sarana dan prasarana pendidikan;
 2. pemanfaatan anggaran kesehatan sebesar Rp. 800 miliar, untuk sarana dan prasarana kesehatan;
 3. pemanfaatan belanja mendesak sebesar Rp. 8,450 triliun, untuk pengadaan peralatan antara lain dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penanganan gejolak sosial dan penanganan *flash point*.
 - ❖ Sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 222 miliar, karena penambahan Target PNBPF fungsi Lantas;
 - ❖ Sumber Anggaran Badan Layanan Umum sebesar Rp. 1,355 miliar, karena penambahan Target pendapatan Rumah Sakit BLU.
- ❖ Bahwa pagu alokasi anggaran Polri T.A. 2019 itu Rp.86,187 triliun. Jadi bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2018 yang 95,031 triliun, jadi kurangnya itu Rp.8,843 triliun atau 9,3 triliun. Jadi untuk kekurangan ini mungkin kami dari jajaran Polri tidak ada komentar lagi, karena memang tahu

bahwa anggarannya mungkin tidak ada. Dan kebetulan juga susut ini bukan di belanja pegawai dan juga bukan di belanja barang, sehingga ada beberapa kebutuhan belanja modal yang memang semestinya kita perlukan juga mungkin kita harus kerja keras dengan cara manual lagi. Tapi tidak berarti dengan kurangnya belanja modal atau pengadaan beberapa jenis barang ini kita akan susut kerja.

- ❖ Untuk pemanfaatannya di 2019 belanja pegawai Rp.43,2 triliun, atau 50,1 persen. Kemudian belanja barang sebesar 25,324 triliun atau 29,3 persen. Ini sudah sesuai dengan usulan dari Polri. Kemudian belanja modal sebesar Rp. 17,662 triliun atau 20,4 persen. Untuk komposisi per program saat ini sedang dilakukan pemetaan kembali.
- ❖ Berharap agar Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI dapat memberikan persetujuan terhadap penetapan alokasi anggaran Polri yang sebesar Rp.86,187 triliun.

3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.PR.02.04-06 Tgl 19 Maret 2018 bahwa Pagu Indikatif Kemenkumham Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 16.071.617.228.000.-
- Anggaran ini untuk membiayai kegiatan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	USULAN
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	4.900.958.911.000
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	60.173.330.000
3	Administrasi Hukum Umum	731.708.867.000
4	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	6.966.764.452.000
5	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.289.572.220.000
6	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	246.953.179.000
7	Pembentukan Hukum	57.132.730.000
8	Pemajuan HAM	56.999.281.000
9	Pembinaan Hukum Nasional	118.700.844.000
10	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	40.690.163.000
11	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	601.963.252.000
JUMLAH		16.071.617.228.000

• **PERBANDINGAN PAGU TA 2019 :**

JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF	PAGU ANGGARAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	6.452.797.400.000	6.452.797.400.000	6.452.797.400.000
Belanja Operasional	1.081.326.876.000	1.081.326.876.000	1.080.684.816.000
BAMA	1.266.071.850.000	1.792.071.850.000	1.792.071.850.000
Belanja Non Operasional (RM)	672.422.697.000	672.422.697.000	673.064.757.000
Belanja Non Operasional (PNBP)	1.627.776.734.000	2.308.772.264.000	2.308.772.264.000
Kegiatan Prioritas Nasional (RM+PNBP)	798.480.779.000	798.480.779.000	798.480.779.000
Kebutuhan Belanja Mendesak	0	0	200.000.000.000
TOTAL	11.898.876.336.000	13.105.871.866.000	13.305.871.866.000

- Kementerian Hukum dan HAM awalnya mengusulkan Rp. 16 triliun. Kemudian dalam pembahasan diberikan pagu indikatif 11,8 Triliun. Berikutnya pagu anggarannya diberikan 13,1 Triliun, yang terakhir dari surat Pimpinan Badan Anggaran ke Komisi III kita dapat tambahan 200 menjadi 12,3 Triliun. Yang tambahan 200 Miliar ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi kebutuhan sarana keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi ini yang kebutuhan sangat mendesak.

4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung (Jaksa Agung berhalangan hadir), diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2019 : Rp. 6.146.271.982.000
- Pagu Alokasi Kejaksaan TA 2019 : Rp. 6.346.271.982.000 (Turun Rp. 58.027.848.000,- dibandingkan Pagu Anggaran TA 2018)
- Penggunaan tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	148.075.776.000
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	30.000.000.000

3.	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	21.924.224.000
----	---	----------------

- Usulan kebutuhan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 Rp. 9.767.178.868.000,00
- Pergeseran Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum untuk membiayai perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung dan bangunan kantor di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar Rp.119.633.261.000,-

• PERMINTAAN TAMBAHAN ANGGARAN KEJAKSAAN RI TA 2019

No.	Program	Permintaan Tambahan Anggaran (Dalam Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	588.894.540.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	2.282.570.987.944
3.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	42.794.405.200
4.	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	61.986.186.000
Jumlah		2.976.246.119.144

• PERMINTAAN TAMBAHAN ANGGARAN KEJAKSAAN RI TA 2019 (lanjutan)

No.	Program	Permintaan Tambahan Anggaran (Dalam Rp)
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	722.930.128.500
2.	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	14.241.400.000
Jumlah		737.171.528.500

5. Sebagai informasi, Sekretaris Mahkamah Agung tidak hadir.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI menyetujui penyempurnaan Program Kerja serta Pagu RAPBN Tahun 2019 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI untuk :
 - 1) Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.305.871.866.000,-
 - 2) Kejaksaan Agung sebesar Rp. 6.346.271.982.000,-
 - 3) Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp. 86,187 Triliun.

2. Komisi III DPR RI akan menerima usulan tambahan dari :
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi tambahan sebesar Rp. 133,37 miliar untuk: peningkatan target penindakan sebesar Rp 50,0 Miliar, Kebutuhan layanan dasar perkantoran sebesar Rp 20,69 Miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp 62,68 Miliar.
 - b. Kejaksaan Agung tambahan sebesar Rp. 737.171.528.500,- untuk Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kejaksaan RI terutama yang terkena musibah bencana alam di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah sebesar Rp 722.930.128.500,- dan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sebesar Rp 14.241.400.000,-
 - c. Kepolisian dan Kemenkumham karena telah menerima sebagian tambahan anggaran yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPR RI akan ditetapkan dalam rapat Komisi III DPR RI sebagai anggaran Tahun Anggaran 2019.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.55 WIB

